

ANALISIS ANCAMAN PHK MASSAL AKIBAT EFISIENSI ANGGARAN DAN MENINGKATKAN ANGKA PENGANGGURAN

Aeida Rustinah¹, Aqiila Azzahra², Sarah Amalia Rahmawati³, Putri Rizkiyah Aripin⁴, Nina Farliana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

Email: aeidapkl@students.unnes.ac.id¹, aqiilaazzahra335@students.unnes.ac.id², sarahamaliarahmawati@students.unnes.ac.id³, putriput03@students.unnes.ac.id⁴, ninafarliana@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak: Efisiensi anggaran adalah strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar dapat meningkatkan efektivitas operasional. Namun, kebijakan ini dapat berdampak negatif, salah satunya yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan membentuk peningkatan angka pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap ketenagakerjaan dan mengidentifikasi solusi untuk mencegah efek negatifnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran yang tidak direncanakan secara matang dapat memperburuk kesejahteraan pekerja, menurunkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan tekanan terhadap sistem jaminan nasional. PHK massal juga akan berdampak pada penurunan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan yang lebih ketat dalam regulasi ketenagakerjaan serta strategi alternatif dalam efisiensi anggaran tanpa harus melalui PHK.

Kata Kunci: Efisiensi, PHK Massal, Pengurangan, Pengangguran, Ketenagakerjaan.

Abstract: Budget efficiency is a strategy carried out by a company and government that aims to optimize the use of resources in order to increase operational effectiveness. However, this policy can have negative impacts, one of which is mass layoffs (PHK) which will form an increase in unemployment and economic instability. This study aims to analyze the impact of budget efficiency on employment and identify solutions to prevent its negative effects. This study uses a qualitative approach method and literature review. The results of this study indicate that with budget efficiency that is not planned properly, it can worsen worker welfare, reduce people's purchasing power, and increase pressure on the national security system. Mass layoffs will also have an impact on decreasing investor confidence and slowing economic growth. Therefore, it is necessary to implement stricter policies in employment regulations and alternative strategies in budget efficiency without having to go through layoffs.

Keywords: Efficiency, Mass Layoffs, Reduction, Unemployment, Employment.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk efisiensi anggaran yaitu terjadinya pengurangan biaya operasional yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga ker, sehingga hal ini membuat peningkatan

pengangguran di Indonesia. (Attallah, 2024) Perusahaan harus memiliki alasan yang jelas dalam melakukan PHK dan memastikan prosedurnya dilakukan dengan benar. Apalagi pekerja yang terkena PHK seringkali mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi yang mempengaruhi stabilitas perekonomian dan sosial mereka. Seharusnya efisiensi anggaran bisa direncanakan dengan matang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Perusahaan wajib memberikan kompensasi yang layak dan mempertimbangkan akan dampak sosial kepada karyawan agar tidak menimbulkan masalah sosial. Hal ini sering kali diakibatkan karena rendahnya pemahaman terhadap hukum ketenagakerjaan serta kurangnya pengawasan dalam regulasi tersebut. Di beberapa kasus, efisiensi anggaran dilaksanakan dengan fokus utama pada pengurangan biaya tanpa mementingkan kesejahteraan tenaga kerja yang akan terdampak. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, PHK massal akibat efisiensi anggaran juga berpotensi memperburuk tingkat pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, efisiensi anggaran yang berujung PHK berdampak pada produktivitas dan moral para pekerja yang masih bertahan di perusahaan. Pengurangan tenaga kerja mengakibatkan peningkatan beban kerja bagi karyawan yang masih bertahan, sehingga mengakibatkan stress dan tekanan dalam bekerja. Apalagi dengan alasan efisiensi anggaran tersebut karyawan yang masih bertahan tidak mendapat tunjangan lebih padahal beban pekerjaan mereka bertambah. Pada tahun 2025, Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, memperkirakan kasus PHK bisa mencapai 100.000 orang akibat kebijakan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menengaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan PHK massal dan belanja pegawai serta bantuan sosial akan dipertahankan. Meski demikian, beberapa sektor tetap merasakan dampak kebijakan ini. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu memperhatikan dampak dari strategi efisiensi anggaran. Perlunya mengedepankan kesejahteraan tenaga kerja dan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi secara luas. Dengan harapan bisa memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman dampak dari kebijakan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, penelitian ini menyelidiki efek efisiensi anggaran yang mengakibatkan PHK massal di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh pemangku kepentingan untuk

meminimalisir dampak negatif PHK serta memperhatikan langkah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi tenaga kerja yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena secara mendalam melalui analisis dari berbagai sumber tertulis yang meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan digital universitas. Dengan metode kajian pustaka, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Anggaran Sebagai Strategi Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bagi Tenaga Kerja

Topik mengenai efisiensi sangatlah penting di dunia pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan anggaran yang terbatas akan memberikan dampak yang besar untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Efisiensi mencerminkan keberhasilan suatu pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang diambil. Indriani Puspitasari (2022). Efisiensi menekankan perbandingan pada pengeluaran input seminimal mungkin tetapi dengan hasil output yang semaksimal mungkin. Tingkat efisiensi akan terus meningkat apabila hasil dan modal semakin besar. Dengan kata lain, jika hal tersebut terjadi artinya efisiensi bisa disebut sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat dengan pengorbanan sekecil mungkin. Baik pemerintah maupun perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan, baik jangka panjang atau jangka pendek. Salah satu tujuan dalam jangka pendek dengan terbuka terhadap kinerja suatu pemerintah dengan menilai anggaran yang dibuat. Maka dari itu, pengeluaran pemerintah diharapkan dikeluarkan jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kualitas dan produktivitas kerja secara keseluruhan.

Untuk pelayanan masyarakat agar mendapatkan porsi yang relatif maksimal. Anggaran bisa menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan tugasnya (F. Manimbaga., J.J. Sondakh., S. Pinatik

2021.). Maka dari itu, pengeluaran pemerintah diharapkan dikeluarkan jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kualitas dan produktivitas kerja secara keseluruhan. Efisiensi anggaran juga dinilai untuk mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga perusahaan atau pemerintah bisa menggantikannya untuk meningkatkan daya saing dan operasional.

Alasan suatu perusahaan/pemerintah melakukan efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran pada dasarnya memang memungkinkan untuk diterapkan. Ketika sebuah perusahaan melakukan efisiensi, itu berarti perusahaan tersebut sedang melakukan analisis yang cermat antara total biaya produksi dan potensi pendapatan yang akan diperoleh selama tahun berjalan. Tentu saja, perhitungan ini harus diimbangi dengan persiapan dan rencana eksekusi yang matang pula. Namun, faktanya di lapangan sering kali ditemukan upaya efisiensi yang dilakukan oleh Perusahaan tanpa persiapan dan 8 rencana yang matang, sehingga menyebabkan tujuan efisiensi yang semula diharapkan memberikan penghematan justru menjadi pemborosan dengan nilai yang cukup signifikan di luar dari yang diperhitungkan (Camelia, 2023).

Selain itu, mengacu pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Terdapat tiga kondisi yang melatarbelakangi perusahaan atau pemerintah melakukan efisiensi anggaran:

1. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
2. Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, mengurangi biaya operasional, dan menjaga stabilitas keuangan.
3. Pengalihan dana untuk program-program prioritas, seperti infrastruktur dan pendidikan, dengan mengalihkan anggaran dari pengeluaran yang tidak produktif.

Efek dari adanya efisiensi anggaran terhadap tenaga kerja

Dengan adanya penerapan efisiensi anggaran memberikan efek yang besar terhadap aspek tenaga kerja. Efisiensi umumnya memiliki tujuan untuk mengurangi operasional dan menjaga stabilitas keuangan suatu perusahaan, Namun, langkah ini sering berdampak buruk pada kesejahteraan dan dinamika tenaga kerja. Efek paling utama yang terjadi dari adanya efisiensi anggaran yakni PHK (pemberhentian kerja). PHK massal sering menjadi konsekuensi yang susah

dihindari ketika suatu perusahaan berusaha untuk menekan biaya operasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang kehilangan pekerjaan, namun juga berefek kepada keluarga yang bergantung pada pendapatan mereka, Selain itu, meningkatnya angka pengangguran akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dampak PHK masal terhadap ekonomi

Pengangguran yang disebabkan dari PHK massal menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian, baik dari segi individu, perusahaan, maupun (Sugihartatik, 2024).

a. Menyebabkan Daya Beli Menurun.

PHK yang menimbulkan penambahan angka pengangguran berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi masyarakat yang berkurang.

b. Kesejahteraan Pekerja berkurang karena Efisiensi Biaya Perusahaan.

Perusahaan melakukan PHK massal sebagai strategi untuk mengurangi biaya operasional. Dana yang semula untuk gaji para pekerja dialihkan ke biaya produksi yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi karena kesejahteraan pekerja terdampak.

c. Menimbulkan Ketimpangan Sosial dan Ketidakstabilan Ekonomi.

Ketika pekerja diberhentikan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, akan menciptakan ketimpangan sosial. Hal ini juga meningkatkan tekanan jaminan sosial dan program bantuan dari pemerintah.

d. Pengaruh terhadap Investasi dan Kepercayaan Pasar.

Kepercayaan Investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara menurun akibat dari PHK massal. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Analisis pengaruh PHK massal dapat mempengaruhi angka pengangguran di pasar tenaga kerja

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 5,86% menjadi 6,36%. PHK massal sebagian besar terjadi pada sektor manufaktur dan teknologi akibat adanya efisiensi anggaran. Sektor manufaktur mengalami angka penurunan pada jumlah tenaga kerja sebesar 3,2%, sedangkan sektor teknologi turun sebesar 2,8%. Efek dari PHK massal akibat efisiensi anggaran tidak hanya terbatas pada peningkatan angka pengangguran, tetapi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber pendapatan bagi para pekerja, yang kemudian mengurangi daya beli mereka. Dampaknya adalah penurunan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data dari BPS, penurunan konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4% pada kuartal ketiga tahun 2024.

Penurunan daya beli ini akan memperparah situasi dengan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan semakin tertekan untuk melakukan efisiensi anggaran lebih lanjut. PHK massal akibat efisiensi anggaran juga memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial. Pada tahun 2024, anggaran untuk jaminan sosial meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar digunakan untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Secara keseluruhan, PHK massal akibat efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap angka pengangguran di pasar tenaga kerja, daya beli masyarakat, kesejahteraan pekerja berkurang, stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dan upaya yang komprehensif untuk memitigasi dampaknya.

Solusi dan Langkah Mitigasi dari peran pemerintah dan perusahaan

Upaya Pemerintah dalam mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 643/MEN/PHIPPHI/IX/2005 yang dikeluarkan pada 26 September 2005. Surat edaran ini memberikan himbauan kepada pengusaha untuk mempertimbangkan langkah-langkah tertentu sebelum melakukan PHK.

Berdasarkan SE No. 643, beberapa saran yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan sebelum mengambil langkah PHK antara lain:

- a. Melakukan efisiensi biaya produksi.
- b. Mengurangi gaji pekerja di tingkat manajerial.

- c. Mengurangi jam lembur.
- d. Menawarkan pensiun dini bagi pekerja yang memenuhi syarat.
- e. Merumahkan pekerja secara bergantian untuk sementara.

Dengan demikian, terdapat banyak langkah efisiensi yang bisa diambil oleh perusahaan tanpa harus mengarah pada pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam kondisi tertentu, perusahaan mungkin tidak memiliki pilihan lain jika menghadapi kesulitan finansial, penurunan keuntungan, atau kerugian yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan program efisiensi perusahaan sangat bergantung pada persiapannya yang matang. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses efisiensi antara lain:

1. Memahami Kondisi Perusahaan

Berdasarkan Pasal 43 PP No. 35/2021, perhitungan kompensasi PHK karena efisiensi harus mempertimbangkan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terlebih dahulu memahami keadaan ekonominya, baik dari sisi makro maupun mikro. Apakah efisiensi dilakukan untuk mencegah kerugian di masa depan atau sebagai respons terhadap kerugian yang sudah terjadi?

2. Pemetaan Pekerja yang Terkena Dampak PHK

Setelah memahami kondisi internal, langkah selanjutnya adalah memetakan departemen atau divisi yang terdampak serta menentukan pekerja mana yang harus di-PHK. Perhitungan kompensasi untuk setiap pekerja seharusnya didasarkan pada jenis hubungan kerja yang ada antara mereka dan perusahaan, sehingga pemetaan ini mempermudah dalam menghitung secara akurat sesuai ketentuan hukum.

3. Memahami Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan

Pelaksanaan efisiensi harus mempertimbangkan aspek hukum, bukan hanya faktor bisnis. Sebagaimana tertera dalam PP 35/2021, terdapat dua kondisi PHK karena efisiensi: satu karena kerugian yang diderita perusahaan dan yang lainnya untuk mencegah kerugian tersebut. Setiap kondisi memiliki implikasi yang berbeda dan diatur dengan prosedur yang harus dipatuhi. Oleh

karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku menjadi krusial agar proses efisiensi dapat berjalan dengan semestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi anggaran yang diterapkan oleh perusahaan dan pemerintah memiliki potensi untuk memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka pengangguran serta menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Kesalahan dalam memahami kondisi perusahaan bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru, yang berujung pada perhitungan hak kompensasi PHK yang tidak tepat. Hal ini membuat proses efisiensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

PHK massal tidak hanya mengurangi kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan ketimpangan sosial, memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, serta menurunkan kepercayaan investor. Semua faktor ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ketat, seperti implementasi Surat Edaran Menteri No. 643 Tahun 2005, sangat penting untuk mengurangi risiko PHK melalui alternatif efisiensi yang tidak melibatkan pemutusan kerja. Selain itu, persiapan yang matang diperlukan agar program efisiensi perusahaan dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan harus memperkuat regulasi ketenagakerjaan serta meningkatkan program perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak. Dengan langkah-langkah yang tepat, efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja serta stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, C. (2023). *DSLCL_Artikel Efisiensi Ketenagakerjaan_FINAL*. [Online]. Retrieved from <https://dslc.law/publication/5-things-that-determine-the-effectiveness-of-manpower-efficiency>
- Armono, D., & Widyaningsih, N. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 323-331.

- Attallah, O., Rahmawati, N., Damayanti, P., Monica Sari, A., Zahro, N., Annisa Zahra, I., Ayu Ambarwati, R., Satul Faidhah, Y., & Amalia Permatasari, N. (2024). Optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan untuk mengatasi dampak PHK massal dan meningkatkan perlindungan pekerja. *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, 2(2).
- Indriani Puspitasari, G. (2022). Efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran, optimalisasi dan kinerja keuangan. *Jurnal ...*, 18(3), 444–455.
- Juliantri, F., Sunaryo, W., & Muharam, H. (2023). Dampak kualitas kehidupan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan IPB University. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, 14(1), 34-45.
- Junianingsih, I. (2020). Analisis kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982-992.
- Prasetyo, W., & Nugraheni, A. (2020). Analisis realisasi anggaran belanja dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang periode 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1).
- Rahadian, D. (2017). Penerapan konsep Resources-Based View (RBV) dalam upaya mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan.
- Sugihartatik, R., Sugeng, A., & Nurman, M. (2024). Juridical analysis of mass termination of employment according to the decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Sia Number: Kep 150/Men/2000. *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Sia Nomor : Kep-150/Men/2000*.